

BAB II

PERSPEKTIF TEORI

A. Budaya Politik

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba mengaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem politik. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba melihat bahwa dalam pandangan tentang objek politik, terdapat tiga komponen yaitu: Komponen Kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan seorang santri terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya.¹⁸

Komponen Afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Komponen Evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Eagly dan Chaiken mengemukakan bahwa sikap seorang santri dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap objek politik, yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif, dan perilaku. Sebagai hasil evaluasi, sikap yang disimpulkan dari

¹⁸ Gabriel A. Almon and Bingham Powell, *Comprative Politic A Developmental Approach* dikutip Rusadi Kantrapawira, *Budaya Politik*, 25.

berbagai pengamatan terhadap objek diekspresikan dalam bentuk respon kognitif, afektif (emosi), maupun perilaku. Gabriel A. Almond mengajukan pengklasifikasian budaya politik sebagai berikut:

1. Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
2. Budaya politik kaula atau subyek, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif.
3. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.¹⁹

Dari ketiga komponen tersebut di atas yang digunakan penulis untuk menentukan budaya politik santri pada pondok pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang.

Semua tipe kebudayaan politik merupakan skala suatu titik awal karena kesenjangan dapat terjadi dalam bentuk penolakan terhadap seseorang pemegang jabatan dan peranan penting dalam suatu perubahan sistematis, yaitu peralihan dari suatu kebudayaan politik yang lebih sederhana menuju pola yang lebih kompleks. Berbagai kebudayaan politik dapat saja tetap bersifat campuran untuk waktu yang lama. Apabila kebudayaan tetap bersifat campuran, maka akan terjadi ketegangan antara kultur dan struktur serta adanya kecenderungan sifat menuju instabilitas struktural. Ada beberapa tipologi kebudayaan politik yang bersifat murni, maka dapat dibedakan 3 bentuk kebudayaan politik:

¹⁹ Ibid, 19.

1. Kebudayaan Subyek-Parokial

Kebudayaan subyek parokial adalah suatu tipe kebudayaan politik di mana sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus.²⁰

Jadi perubahan dari kebudayaan politik parokial menuju kebudayaan politik subyek dapat dimantapkan pada sejumlah poin tertentu dan menghasilkan perpaduan politik, psikologi dan kultural yang berbeda-beda. Teori Gabriel dan Verba juga menegaskan bahwa jenis perpaduan yang dihasilkan mengandung manfaat besar terhadap stabilitas dan penampilan sistem politik tersebut.

2. Kebudayaan Partisipan-Subyek

Kebudayaan partisipan-subyek ini mempunyai proses peralihan dari kebudayaan parokial menuju kebudayaan subyek yang dilakukan pasti mempengaruhi cara bagaimana proses peralihan dari budaya subyek menuju budaya partisipan berlangsung. Seperti ditunjukkan oleh Gabriel dan Verba bahwa penanaman rasa loyalitas nasional dan identifikasi, serta kecenderungan untuk mentaati peraturan pemerintahan pusat, merupakan masalah prioritas yang pertama bagi bangsa-bangsa yang baru muncul.²¹

Dalam budaya subyek-partisipan yang bersifat campuran itu sebagian besar masyarakat telah memperoleh orientasi-orientasi input-output yang bersifat

²⁰ Gabriel A. Almon and Bingham Powell, *Comparative Politics A Developmental Approach* dikutip Rusadi Kantrapawira, *Budaya Politik*, 29.

²¹ Ibid, 30.

khusus. Sebagian besar diorientasikan kearah suatu struktur pemerintahan otoritaritas dan secara relatif memiliki rangkain orientasi yang pasif.

3. Kebudayaan Parokial-Partisipan

Dalam kebudayaan ini kita mendapatkan masalah kontemporer mengenai pembangunan kebudayaan di sejumlah Negara yang sedang berkembang. Di negara ini budaya politik yang dominan adalah budaya parokial. Norma-norma struktural yang telah diperkenalkan biasanya bersifat partisipan, demi keselarasan mereka menuntut suatu kultur partisipan. Sehingga persoalan yang erlu ditanggulangi ialah mengembangkan orientasi input dan output secara simultan. Bukan suatu hal yang aneh jika hampir semua sistem politik ini terancam oleh fragmentasi parokial, karean tidak ada struktur untuk bersandar bagi masyarakat, birokrasi tidak berdiri tegak terhadap kesetiaan masyarakatnya, sedangkan infrastruktur tidak berakar dari warganegara yang kompeten dan bertanggungjawab.²²

Perrkembangan dari budaya parokial kearah budaya partisipan di lihat dari satu segi, nampaknya menjadi suatu hal yang tidak mempunyai harapan, tetapi jika kita ingat dengan kekuasaan dari loyalitas parokial yang hidup maju di Indonesia ini maka paling tidak boleh berkata bahwa perkembangan kearah budaya partisipan di negara berkembang belum di buka. Dengan begitu perlu melakukan penetrasi terhadap sistem-sistem parokial tanpa harus merusak sisi outputnya sekaligus menyalurkan dalam kelompok kepentingan yang terletak disisi input.

²² Ibid, 32.

Dari penjelasan di atas bahwa hampir semua budaya politik itu bersifat heterogen. Budaya politik santri pada Pondok Pesantren Tebuireng ini masuk pada tipologi budaya politik campuran parokial-partisipan. Karena di dalam kebudayaan politik parokial-partisipan lebih berorientasi kearah partisipasi, tetapi masih saja terdapat perbedaan pokok dalam orientasi politik. Demikian pula di Pondok Pesantren Tebuireng ini bahwa santri sangat ingin berpartisipasi terhadap jalannya sistem politik di Indonesia, hanya saja santri masih terikat oleh pesantren dan Kyai. Dari sini lah santri masih pasih untuk lebih mengedepankan pengaruh sosial-politiknya terhadap politik praktis.

Konsep budaya politik muncul dan mewarnai wacana ilmu politik pada akhir Perang Dunia II, sebagai dampak perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat. Sebagaimana diungkapkan oleh banyak kalangan ilmuwan politik, setelah PD II selesai, di Amerika Serikat terjadi apa yang disebut revolusi dalam ilmu politik, yang dikenal sebagai *Behavioral Revolution*, atau ada juga yang menamakannya dengan *Behavioralism*.²³ Behavioral revolution terjadi dalam ilmu politik adalah sebagai dampak dari semakin menguatnya tradisi atau madzhab *positivisme*, sebuah paham yang percaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan akan gejala sosial seperti halnya ilmu-ilmu alam memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam, dalam ilmu sosial, termasuk ilmu politik. Paham ini sangat kuat diyakini oleh tokoh-tokoh besar sosiologi, seperti Herbert Spencer, Auguste Comte, juga Emile Durkheim.

²³ Afan Gaffar, *Politik Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 97.

Paham positivisme merupakan pendapat yang sangat kuat di Amerika Serikat semenjak Charles E. Merriam mempelopornya di Universitas Chicago, yang kemudian dikenal sebagai *The Chicago School* atau Madzhab Chicago, yang memulai pendekatan baru dalam ilmu politik. Salah satu dampak yang sangat menyolok dari behavioral revolusion ini adalah munculnya sejumlah teori, baik yang bersifat grand maupun pada tingkat menengah (*middle level theory*). Kemudian, ilmu politik diperkaya dengan sejumlah istilah, seperti misalnya sistem analysis, interest aggregation, interest articulation, political socialization, politic culture, conversion, rule making, rule application, dan lain sebagainya.

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik baik masyarakat maupun santri.

Teori tentang sistem politik yang diajukan oleh David Easton yang kemudian dikembangkan pula oleh Gabriel A. Almond, ini mewarnai kajian ilmu politik pada kala itu (1950-1970). Dan diantara kalangan teoritis dalam ilmu politik yang sangat berperan dalam mengembangkan teori kebudayaan politik adalah Gabriel Almond dan Sidney Verba, ketika keduanya melakukan kajian di lima negara yang kemudian melahirkan buku yang sangat berpengaruh pada 1960-an dan 1970-an, yaitu *The Civic Culture*. Civic Culture inilah yang menurut

Gabriel Almond dan Sidney Verba merupakan basis bagi budaya politik yang membentuk demokrasi.

Gabriel A. Almond menunjukkan bahwa setiap sistem politik mewujudkan dirinya di dalam pola orientasi-orientasi dan tindakan-tindakan politik tertentu. Dalam pengertian yang hampir sama, Lucian W. Pye mendefinisikan budaya politik sebagai *the ordered subjective realism of politic*, (tertib dunia subjektif politik). Definisi Sidney Verba berikut merupakan yang paling jelas bahwa Budaya Politik adalah, menunjuk pada sistem kepercayaan-kepercayaan tentang pola-pola interaksi politik dan institusi-institusi politik.²⁴

Gabriel A. Almond menunjuk bukan pada apa yang diyakini orang tentang kejadian-kejadian tersebut kepercayaan-kepercayaan yang dimaksud dapat mengenai beraneka jenis, berupa kepercayaan-kepercayaan empirik mengenai situasi kehidupan politik, dapat berupa keyakinan-keyakinan mengenai tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang harus dihayati di dalam kehidupan politik dan semuanya itu dapat memiliki perwujudan atau dimensi emosional yang sangat penting. Dari beberapa jenis kepercayaan yang dijelaskan oleh Gabriel A. Almond, para santri Pondok Pesantren Tebuireng masuk kepada jenis yang memiliki kepercayaan yang empirik karena santri selain mempunyai keyakinan yang mutlak santri juga mempunyai tujuan yang pasti dalam kehidupan Agama maupun Politik. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba mendefinisikan budaya politik sebagai: “Suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem

²⁴ Hasmirah, *Budaya Politik Etnis Tionghoa*, (Makassar : Skripsi, 2007), 9-10.

politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.²⁵

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subyektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya.²⁶

Kegiatan budaya politik seorang santri tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik. Bentuk dari budaya politik seorang santri dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya.

Dengan kata lain, budaya politik seorang santri di Pondok Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang dapat didefinisikan sebagai pola distribusi tujuan-tujuan yang dimiliki oleh anggota masyarakat terhadap objek-objek politik atau bagaimana distribusi pola-pola tujuan khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat itu. Lebih jauh dinyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan

²⁵ Sidney Verba dalam Buku Afan Gaffar, *Politik Indonesia*, 101.

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 49.

berdasarkan tujuan yang mereka miliki. Dengan tujuan itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik. Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku seseorang ataupun santri dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh pendiri Pondok dan tokoh-tokoh yang berpengaruh yang masuk pada ranah suatu sistem politik.²⁷

Pengertian budaya politik santri diatas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Konsep orientasi mengikuti pengertian Talcott Parsons dan Sidney Verba yang mendefinisikan orientasi sebagai aspek-aspek dari objek dan hubungan-hubungan yang diinternalisasikan di dalam dunia subjektif individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat tertentu, yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.²⁸

B. Orientasi dan Sikap dalam Budaya Politik

Dalam pendekatan perilaku, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya dan akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul budaya politik. Orientasi

²⁷ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru, 1977), 24.

²⁸ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: SIC, 2002), 32-33.

politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi budaya politik seseorang. Karena hakekat kebudayaan politik suatu santri terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif, dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan-tindakan politik, maka kebudayaan politik selalu menyediakan arah dan orientasi subyektif bagi politik. Karena kebudayaan politik hanya merupakan salah satu aspek dari kehidupan politik, maka jika kita ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu kelompok masyarakat secara bulat dan utuh, maka kitapun dituntut melakukan penelaahan terhadap sisi yang lain.

Orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan santri dalam suatu struktur masyarakat. Timbulnya orientasi itu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam sosok santri maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola mereka untuk memandang suatu obyek politik. Berkaitan dengan sistem politik, kebudayaan politik santri dipengaruhi oleh sejarah perkembangan dari segi sistem ataupun pengaruh tokoh dalam pondok pesantren, di samping itu kebudayaan politik santri lebih mengutamakan dimensi psikologis suatu sistem, seperti sikap, sistem kepercayaan, atau simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam suatu masyarakat sekaligus harapan-harapannya. Variabel yang ada bisa berawal dari suasana psikologis seseorang, argumentasi umum dalam jajaran psikologi sosial, dan terminal terakhir bertumpu pada status sosial-ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai determinan pembentukan orientasi, sikap dan tingkah laku dalam politik.

Kebudayaan politik sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem Sosial-Budaya santri dalam arti luas.²⁹ Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar seorang santri bisa mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari. Adapun nilai-nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang biasanya berkaitan erat dengan atau bagian dari nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama. Alfian nampaknya menempatkan faktor lingkungan budaya sebagai salah satu faktor penentu orientasi politik seseorang disamping sejumlah faktor lainnya.³⁰

Sikap suatu kecenderungan berperilaku adalah produk dari proses sosialisasi yang banyak ditentukan oleh faktor budaya. Proses pembentukan sikap politik yang pada gilirannya berupa perilaku politik yang diperoleh melalui sosialisasi politik, tak pernah hadir di dalam budaya. Budaya politik seorang adalah pola perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi faktor eksternal seperti situasi lingkungan atau faktor internal seperti: kebutuhan, SINA (Sitem Nilai dan Asumsi) dan SKSM (Sistem Koordinasi Senso Motorik) yang orientasinya berkisar pada situasi kehidupan politik yang sedang berlaku, bagaimana tujuan-tujuan yang didambakan oleh sistem politik itu sendiri, serta harapan-harapan politik apa yang dimilikinya, biasanya akan bercampurbaaur dengan prestasi di bidang peradaban.³¹

²⁹ Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1986), 244-245.

³⁰ Alfian, *Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, (Jakarta:LP3ES, 1985), 24.

³¹ Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 25-26.

Beberapa definisi sikap yaitu, berorientasi kepada respon : Pertama sikap adalah suatu bentuk dari perasaan, yaitu perasaan mendukung atau memihak (*favourable*) maupun perasaan tidak mendukung (*Unfavourable*) pada suatu objek politik. Kedua berorientasi kepada kesiapan respon : sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek politik dengan cara-cara tertentu, apabila dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon dan suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif untuk menyesuaikan diri dari situasi sosial politik yang telah terkondisikan. Ketiga berorientasi kepada skema triadik : sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif dan afektif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek politik di lingkungan sekitarnya. Secara sederhana sikap didefinisikan sebagai Ekspresi sederhana dari bagaimana kita suka atau tidak suka terhadap beberapa hal.³² Komponen atau struktur sikap suatu kelompok ataupun santri yaitu :

1. Komponen kognisi yang berhubungan dengan *belief* (kepercayaan atau keyakinan), ide, konsep persepsi, stereotipe, opini yang dimiliki santri mengenai sesuatu yang berkaitan dengan keyakinannya.
2. Komponen Afeksi yang berhubungan dengan kehidupan emosional seorang masyarakat sendiri yang menyangkut perasaan seseorang terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap: pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga Pendidikan Agama, dan faktor emosional. Eagly dan Chaiken

³² Ibid, 8-9.

(1993) mengemukakan bahwa sikap dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap objek politik, yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif, dan perilaku. Sebagai hasil evaluasi, sikap yang disimpulkan dari berbagai pengamatan terhadap objek diekspresikan dalam bentuk respon kognitif, afektif (emosi), maupun perilaku.

Menurut ahli psikologi sosial, yang memandang bahwa belajar sebagai suatu proses yang berakhir dengan terjadinya perubahan pola tingkah laku seseorang. Menurut para ahli itu, bahwa nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu masyarakat, termasuk didalamnya nilai-nilai politik, senantiasa mengalami proses transformasi, pemahaman dan internalisasi ke dalam individu melalui tiga mekanisme utama, yakni asosiasi, peneguhan dan imitasi, di mana tingkah laku para aktor politik penting ditiru, sebagai bagian dari perilaku masyarakat.³³

Dari tiga proses di atas, apa yang disebut nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang membentuk budaya politik dan diwariskan dari generasi ke generasi untuk kemudian mendikte orientasi, sikap dan tingkah laku politik santri dalam kebudayaan. Pada dimensi inilah keterkaitan antara budaya politik santri dengan sikap dan tingkah laku politik, termasuk didalamnya partisipasi politik. Dimensi lain yang cukup mendasar perlu dicermati, adalah refleksi dari proses budaya politik santri dalam upaya menjabarkan kekuasaan masyarakat, sebagai cerminan wajah nyata dari orientasi, sikap dan tingkah laku. Selain itu budaya politik santri juga merupakan dialektika dari suatu masyarakat politik dalam

³³ Arifin Rahman, *Sistem Politik*, 36.

menjawab tantangan-tantangan politik yang menghalangi pada setiap fase pematapan perkembangannya dalam psantren.

Penelitian kebudayaan politik ditandai adanya titik pusat perhatian pada masalah-masalah sosialisasi dan pengalaman-pengalaman politik yang dialami oleh berbagai tokoh di dalam pondok pesantren, yang diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya serta situasi di mana kebudayaan politik itu berubah. Penelitiannya dapat pula menjurus pada suatu perspektif baru dari perjalanan sejarah suatu tokoh, dengan memberikan perhatian utama yakni, bagaimana kepercayaan politik yang asasi dipengaruhi oleh ingatan atas peristiwa-peristiwa politik masa lampau.

Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrinnya dan aspek generikanya. Pertama, menekan pada isi atau materi budaya politik yang dapat dijumpai pada studi tentang doktrin: seperti sosialisme, demokrasi atau nasionalisme dan Islam. Kedua, aspek generika yang menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik terhadap santri. Misalnya, apakah budaya politiknya militan, utopis, terbuka atau tertutup. Pada aspek generikanya dari budaya politik, dapat dilihat dari hakekat, bentuk dan peranannya.³⁴ Hakekat atau ciri-ciri pokok dari budaya politik santi ini menyangkut masalah nilai-nilai. Nilai-nilai seorang santri adalah mempunyai prinsip-prinsip dasar yang melandasi doktrin atau suatu pandangan hidup. Nilai-nilai yang dimaksud ini berhubungan dengan masalah tujuan, seperti nilai-nilai pragmatis atau utopis.

³⁴ Ibid, 36-37.

Gabriel A. Almond mencatat, bahwa aspek lain yang menentukan orientasi politik seseorang, adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (*trust*) dan “permusuhan” (*hostility*).³⁵ Perasaan ini dalam realitas sosial berwujud dalam kerjasama dan konflik yang merupakan dua bentuk kualitas politik. Rasa percaya mendorong kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bekerjasama dengan kelompok lain. Sebaliknya kelompok-kelompok yang bekerjasama memungkinkan timbulnya konflik. Dengan demikian, kerjasama dan konflik tidak saja mewarnai kehidupan masyarakat, tetapi juga merupakan ciri budaya politik.

Budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang di dalam dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini terjadi, karena kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar-orientasi dan antar-nilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kelompok antar budaya, dan menjadi pemicu dalam menjalin proses integrasi dan pengembangan budaya politik santri. Dengan memahami budaya politik, kita akan memperoleh paling tidak dua manfaat. Pertama, sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapan, dukungannya serta orientasinya terhadap sistem politik itu. Kedua, dengan memahami hubungan antara budaya politik dan sistem politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatannya dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.³⁶ Proses pematangan budaya politik merupakan pekerjaan jangka panjang yang hampir tidak memiliki

³⁵ Gabriel A. Almon and Bingham Powell, *Comprative Politic A Developmental Approach* dikutip Rusadi Kantrapawira, *Budaya Politik*, 42.

³⁶ *Ibid.*

perhentian. Proses ini berjalan seiring dengan dinamika perjalanan masyarakat dan sistem politiknya.

C. Tipologi Budaya Politik

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba membagi budaya politik dalam tiga jenis, yakni budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek dan budaya politik partisipan.³⁷ Yang penting dari klasifikasi tersebut adalah kepada objek politik apa aktor politik individual berorientasi, bagaimana mereka mengorientasikan diri, dan apakah objek-objek politik tersebut terlibat secara mendalam di dalam pembuatan kebijaksanaan atau di dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Hasilnya adalah beberapa jenis tiga tipe ideal budaya politik berikut:

1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial (*parochial political culture*) adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat murni merupakan fenomena umum yang biasa ditemukan didalam masyarakat-masyarakat yang belum berkembang, dimana spesialisasi politik sangat minimal.

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana,sebut saja Pondok Pesantren Tebuireng salah satunya dengan ciri

³⁷ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*-terj, Sahat Simamora, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 27.

khas spesialisasi masih sangat kecil, sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki pengkhususan tugas. Tetapi peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan peranannya baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan atau spiritual dalam Budaya Politik Santri pada Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Peranan Kyai sangat berpengaruh terhadap santri karena Kyai juga membatasi komitmen pribadi para santri terhadap politik dan mendesak komitmen para santri untuk menjadi lunak.

2. Budaya Politik Kaula

Budaya politik subyek atau kaula memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (*input*) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (*output*) sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggaan terhadapnya atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah. Namun demikian, ketika posisi para santri Tebuireng sebagai subyek (kaula) mereka dipandang sebagai posisi yang pasif. Diyakini bahwa posisi santri tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik, disisi lain suara santri juga sangat berpengaruh jika di lihat dari segi Politik meskipun santri hanya melihat di belakang panggung. Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subyek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan

yang diambil oleh yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan seorang santri memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan atau kebijakan pemerintah adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah, apalagi ditentang.

3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah suatu budaya politik dimana para warga masyarakat ataupun santri juga memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik dan administratif. Dengan perkataan lain, perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi. Dalam budaya politik partisipasi seorang santri atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Santri juga merealisasi dan mempergunakan hak-hak politiknya di belakang panggung politik. Dengan demikian, santri dalam budaya politik partisipan tidak begitu saja menerima keputusan politik. Hal ini karena santri telah sadar bahwa betapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu.³⁸ Model-model di atas kaitannya dengan studi tentang Budaya Politik Santri pada Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dirasakan penting karena dapat menunjukkan karakteristik-karakteristik khas serta tujuan-tujuan warga negara terhadap sistem dan proses politik.

³⁸ Ibid, 29-32.

D. Santri

Santri digunakan untuk menunjuk pada golongan orang-orang Islam di Jawa yang memiliki kecenderungan lebih kuat pada ajaran-ajaran agamanya, sedangkan untuk orang-orang yang lebih mengutamakan tradisi kejawaannya biasanya disebut kaum “abangan”. Mengenai asal-usul perkataan “santri” ada dua pendapat yang bisa dijadikan acuan. Pertama, adalah pendapat yang mengatakan bahwa “santri” itu berasal dari perkataan “sastri”, sebuah kata dari bahasa Sansakerta, yang artinya melek huruf. Dulu, lebih-lebih pada permulaan tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Demak, kaum santri adalah kelas “leterary” bagi orang Jawa. Ini disebabkan pengetahuan mereka tentang agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab. Dari sini bisa kita asumsikan bahwa menjadi santri berarti juga menjadi tahu agama (melalui kitab-kitab tersebut). Atau paling tidak seorang santri itu bisa membaca Al-Qur’an yang dengan sendirinya membawa pada sikap lebih serius dalam memandang agamanya.

Kedua, adalah pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, persisnya dari kata cantrik, yang artinya seseorang yang selalu mengikuti seorang guru ke mana guru ini pergi menetap. Tentunya dengan tujuan didapat darinya mengenai suatu keahlian. Sebenarnya kebiasaan cantrik ini masih bisa kita lihat sampai sekarang, tetapi sudah tidak “sekental” seperti yang pernah kita dengar. Misalnya, seseorang yang hendak memperoleh kepandaian dalam pewayangan, menjadi dalang atau manabuh gamelan, dia akan mengikuti orang lain yang sudah ahli, dalam hal ini biasanya dia disebut “dalang cantrik”. karena sampai sekarang, tidak terdapat cara yang

sungguh-sungguh dan “profesional” dalam mengajarkan kepandaian-kepandaian tersebut. Pemindahan kepandaian itu, sebagaimana juga dengan pemindahan obyek kebudayaan lain pada orang Jawa “abangan”, lebih banyak melalui pewarisan langsung dalam pengalaman sehari-hari.³⁹

Pola hubungan “guru-cantrik” itu kemudian diteruskan dalam masa Islam. Pada proses evolusi selanjutnya “guru-cantrik” menjadi “guru-santri”. Sekalipun perkataan “guru” masih dipakai secara luas sekali, tetapi untuk guru yang terkemuka kemudian digunakan perkataan “kyai”, untuk laki-laki, dan “nyai” untuk wanita. Perkataan “kyai” sendiri agaknya berarti tua, pernyataan dari panggilan orang Jawa kepada kakeknya yahi, merupakan singkatan dari pada kiai, dan kepada nenek perempuannya “nyahi”. Tetapi disitu terkandung juga rasa pensucian pada yang tua, sebagaimana kecenderungan itu umum dikalangan orang Jawa. Sehingga “kyai” tidak saja berarti “tua” (yang kebetulan sejalan dengan pengertian “syekh” dalam bahasa Arab), tetapi juga berarti sakral, keramat, dan sakti.⁴⁰

Proses belajarnya santri kepada kiai atau guru itu sering juga sejajar dengan sesuatu kegiatan pertanian. Agaknya arti sesungguhnya dari perkataan “cantrik” adalah orang yang menumpang hidup atau dalam bahasa Jawa juga disebut ngenger. Pada masa sebelum kemerdekaan, orang yang datang menumpang di rumah orang lain yang mempunyai sawah-ladang untuk ikut menjadi buruh tani adalah juga disebut santri. Tentu ini juga berasal dari perkataan cantrik tadi. Seorang Kiai adalah juga seorang pemilik sawah yang

³⁹ Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2004), 21-22.

⁴⁰ Ibid.

cukup luas. Umumnya memang demikian. Dengan sendirinya biasanya mereka adalah juga seorang haji.⁴¹

Kedudukan guru atau kiai sebagai seorang haji itu kiranya dapat menerangkan, mengapa kemudian proses belajar kepada kiai disebut “ngaji” adalah bentuk kata kerja aktif dari perkataan kaji, yang berarti mengikuti jejak haji, yaitu belajar agama dengan berbahasa Arab. Agaknya karena keadaan pada abad-abad yang lalu memaksa orang yang menunaikan ibadah haji untuk tinggal cukup lama di tanah suci sehingga ini memberi kesempatan padanya untuk belajar agama di Makkah, yang kelak diajarkan kepada orang lain ketika pulang.⁴²

Perkataan “ngaji” itu mungkin juga berasal sebagai bentuk kata kerja aktif dari aji yang berarti terhormat, mahal, atau kadang-kadang sakti. Keterkaitan ini bisa kita buktikan dari adanya perkataan aji-aji yang berarti jimat. Jadi mengaji adalah memang merupakan kegiatan belajar yang dianggap suci atau aji oleh seorang santri yang menyerahkan dan menitipkan hidupnya kepada seorang kyai yang selain sangat dihormati juga biasanya sudah tua dan sudah menunaikan ibadah haji karena kemampuan ekonominya.

Pada mulanya seorang santri atau beberapa orang dapat ditampung hidupnya di rumah seorang kyai. Mereka itu bekerja untuk kiai di sawah dan di ladang atau menggembalakan ternaknya. Dan ketika bekerja ini kehidupan mereka ditanggung oleh kyai. Tetapi lama kelamaan hal itu tidak lagi terpikul kiai, dan mulailah para santri mendirikan bangunan-bangunan kecil tempat tinggal mereka

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid, 23.

yang semula sementara itu disebut pondok. Pergi ke pesantren adalah pergi ke pondok atau “mondok”, bagi orang yang ingin menjadi santri.

Setelah jumlah santri dalam sebuah pesantren menjadi semakin banyak, kiai juga tidak dapat lagi menyediakan pekerjaan bagi mereka yang biasanya digunakan untuk menghidupi mereka. Sebab sawah, ladang, dan ternak yang dimiliki kiai tentunya sangat terbatas dibanding dengan jumlah santrinya. Maka mulailah para santri memikirkan sendiri penghidupan mereka dengan berbagai jalan. Meskipun banyak yang mencari pekerjaan disekitar pondok, misalnya menjadi tukang setrika, menjadi pembantu diwarung, dan menyewakan sepeda kepada sesama santri, tetapi kebanyakan mereka menggantungkan biaya hidupnya dari kiriman bulanan orang-tuanya. Karena alasan menghemat (mereka berasal dari keluarga-keluarga sederhana di desa-desa) atau lainnya, kebanyakan para santri mengerjakan sendiri segala sesuatu yang mereka perlukan seperti menanak nasi, memasak, mencuci pakaian, dan menyetrika.

Satu istilah lain untuk santri sebagaimana lazimnya digunakan oleh orang Jawa ialah kata *putihan*, yang diturunkan dari pangkal kata *putih*, dengan akhiran *-an*. Istilah ini agaknya dipakai karena pakaian putih yang mereka kenakan waktu bersholat. Para *putihan* biasanya memakai *kopyah* terbuat dari beludru hitam, sehelai kemeja putih dan sarung (terutama bila mereka ikut bersholat dalam mesjid). Setelah mereka naik haji ke Makkah, dan setelah menjadi *kaji* (haji), mereka tukarkan *kopyah* tadi dengan peci katun putih atau *kopyah kaji*.⁴³

⁴³ Zaini Muchtarom, *Santri dan Abangan di Jawa*, (Jakarta: INIS, 1988), 6.

Pada zaman pra-Islam pernah ada desa-desa beragama yang penghuninya taat pada peraturan-peraturan ketat tertentu. Setelah penghuninya masuk Islam, desa-desa tersebut menjadi desa keramat Islam yang penghuninya patuh sekali kepada ajaran agama Islam dan kepada *ulama* dan *kyai* mereka. Ada beberapa pesantren yang didirikan dalam desa-desa seperti itu. Sampai sekarang desa-desa tersebut dinamakan *desa mutihan* seperti di Tebuireng Jombang. Sejak raja-raja yang beragama Islam membebaskan desa-desa itu dari pajak dan supaya mampu memelihara pesantren atau menjalankan kewajiban agama lainnya, desa tersebut dinamakan *desa perdikan* yang dibebaskan dari pajak dan tugas. *Pranata desa perdikan* ini benar-benar merupakan pranata yang sudah berjalani selama zaman Jawa Hindu.⁴⁴

Istilah santri yang memang lebih sering dipakai dari *putihan*, dalam artinya yang asli dan sempit, digunakan untuk mengacu kepada para siswa sekolah agama yang disebut *pesantren*, seperti *pesantren* di Madura, pondok di Pasundan. Dalam pondok pesantren Jombang para santri melakukan telaah agama, dan di sana mereka memperoleh bermacam-macam pendidikan rohani, mental dan sedikit banyak juga jasmani. Dalam arti luas dan lebih biasa, istilah santri mengacu kepada segolongan Muslim Jawa yang menyatakan kebaktian yang paling sungguh-sungguh kepada agama Islam, dengan menjalankan ibadah sholat, siam (puasa), haji dan seterusnya.

Istilah santri di Jawa Timur, berarti siswa atau murid sebuah pesantren, sementara di kota istilah tersebut mengacu kepada para Muslimin Jawa yang

⁴⁴ Ibid.

tinggal dalam pemukiman sekitar mesjid yang dinamakan *kauman*. Dalam hal ini lebih-lebih penting kita minta perhatian terhadap cara para cendekiawan muslim Indonesia menanggapi penggunaan istilah santri oleh para pengamat dari luar. Pada umumnya para Muslimin Indonesia memakai istilah lain, mereka lebih menyukai menggunakan ungkapan “pemeluknya yang setia” dan bukan istilah santri.⁴⁵

Inti lembaga kelompok-kelompok santri ada di sekitar masjid dan dalam pesantren. Adapun pesantren Tebuireng Jombang itu lebih berhasil mendirikan ummah Islam sebab sifatnya berdasarkan pola zaman lampau yang diubah. Dalam pesantren itu santri-santri dari berbagai daerah tinggal bersama dalam asrama, memasak makanannya sendiri dan biasanya bekerja di sawah milik pesantren tersebut atau milik para pendukung pesantren itu. Jadi di sekitar pesantren itulah peguyuban santri desa berkembang.

Dalam mempertahankan Islam yang lebih berpengaruh ialah inti para mukminin yang giat, yaitu *kyai* dan *ulama* yang merupakan inti pola kehidupan santri. Semula peradaban santri itu rupanya terbatas pada kota perdagangan, kemudian peradaban itu menembus ke daerah pedalaman pulau Jawa. Pusat ide Islam terletak dalam konsepsi *ummah* (peguyuban Islam). Orang yang baru masuk Islam sama-sama terikat oleh kepatuhannya kepada ajaran Islam. Maka pesantren menjadi saluran utama bagi masuknya Islam ke dalam kehidupan desa. Pesantren-pesantren besar yang dipimpin oleh *kyai-kyai* yang termasyhur, tumbuh dalam berbagai desa, sedangkan pesantren-pesantren yang agak kecil timbul di seluruh

⁴⁵ Ibid, 10.

pulau Jawa. Kelak dalam hampir setiap desa munculah orang-orang didikan pesantren yang dapat memberikan pelajaran dalam ibadah Islam dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an.⁴⁶

Ummat beragama sekitar pesantren yang terdiri dari para kyai dan santri, bertanggung jawab atas didirikannya ortodoks Islam karena tidak terdapat tata tingkat semacam di gereja atau masyarakat para penyebar agama. Sebaliknya pesantren, sebagai inti ummat Islam yang saleh, merupakan peguyuban ibadah, suasana tempat para Muslimin hidup mewujudkan *ummah* (umat). Inilah yang merupakan tempat bagi dorongan kepada pengislaman di Jawa. Diantara para santri perhatian terhadap ajaran Islam hampir seluruhnya mengatasi segi-segi upacaranya. Bagi para santri, arti pentingnya bukan saja terletak pada pengetahuan tentang seluk beluk upacara, terutama shalat sehari-hari, puasa, sedekah, dan sebagainya, tetapi juga pada penerapan ajaran Islam dalam kehidupan.

Para santri juga bersi keras bahwa mereka adalah Muslimin sejati, dan keterikatan mereka kepada agama Islam menguasai sebagian terbesar kehidupannya. Sikap itu terwujud dan mudah diketahui dalam pengamalan syariat. Bagi para santri, kesadaran ummah (ummat) mendapat arti penting dan utama. Islam dipandang oleh para santri sebagai rangkaian lingkaran-lingkaran sosial yang membentang dari santri perseorangan sampai ke masyarakat besar yang meliputi para mukminin yang sama derajatnya serta keseluruhan dunia Islam. Rasa persamaan dan rasa keanggotaan ummah berdasarkan suku guru Islam, iman

⁴⁶ Ibid, 23.

dan amalnya. Iman dan amal saleh melakukan shalat sehari-hari dan shalat jum'at terbatas pada para santri.⁴⁷

Santri adalah sebutan bagi murid yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren. Pondok Pesantren adalah sekolah pendidikan umum yang persentasenya lebih banyak ilmu-ilmu pendidikan agama Islam. Kebanyakan muridnya tinggal di asrama yang disediakan di sekolah itu. Pondok Pesantren banyak berkembang di pulau Jawa. Panggilan Santri pada Pondok Tebuireng Jombang artinya ia pernah atau lulus dari Pondok Pesantren tersebut. Panggilan Santri terhadap Kyai artinya ia pernah diajar oleh *Kyai*. Umumnya, sebutan *santri-Kyai* juga berarti ia pernah menjadi anak asuh, anak didik (biasanya di rumah kediaman) kyai yang bersangkutan.⁴⁸ Santri, yaitu orang muslim saleh yang memeluk agama Islam dengan sungguh-sungguh dan dengan teliti menjalankan perintah-perintah agama Islam sebagaimana yang diketahuinya, sambil berusaha membersihkan akidahnya dari syirik yang terdapat di daerahnya. Santri yang mewakili sikap menitikberatkan pada segi-segi Islam.⁴⁹ Santri merupakan orang muslim yang memeluk agama Islam dengan sungguh-sungguh dan dengan menjalankan perintah-perintah agama Islam sebagaimana yang diketahuinya, sambil berusaha membersihkan akidahnya dari syirik yang terdapat di daerahnya.

E. Pesantren

Pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe- dan akhiran an, yang berarti tempat tinggal santri yaitu seseorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti, tempat orang untuk belajar agama

⁴⁷Ibid, 33-34.

⁴⁸ Wikipedia bahasa Indonesia, (2-feb-2010, www.google.com), 1.

⁴⁹ Zaini Muchtarom, *Santri dan Abangan di Jawa*, 40.

Islam. Ada juga yang mengartikan pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang bersifat “tradisional” untuk mendalami ilmu tentang agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian.

Tradisi pesantren merupakan kerangka sistem pendidikan Islam tradisional di Jawa dan Madura, yang dalam perjalanan sejarahnya telah menjadi obyek penelitian para sarjana yang mempelajari Islam di Indonesia. Menurut tradisi pesantren, pengetahuan seseorang diukur oleh jumlah buku-buku yang telah pernah dipelajarinya dan kepada “Ulama” mana ia telah berguru. Walaupun jumlah cabang pengetahuan yang dipelajari sangat terbatas, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pendidikan di pesantren membatasi cara berpikir dan perhatian murid.

Menurut Sartono Kartodirdjo hanya menekankan aspek-aspek politik dalam kehidupan pesantren karena dalam perhatiannya hanya menyangkut tentang peranan politik pesantren dalam gerakan-gerakan protes di pedesaan di Jawa pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Oleh karena itu gambaran-gambaran yang ia berikan tentang pesantren, mengarahkan jalan pikiran kita untuk menyimpulkan bahwa lembaga-lembaga pesantren telah menekankan pentingnya perjuangan politik daripada kepentingan-kepentingan yang lain.

Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Ia bahkan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung kepada kemampuan pribadi Kyainya. Menurut asal-usul perkataan Kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda:

1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat seperti, “Kyai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Keraton Yogyakarta.
2. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
3. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang menjadi pemimpin di sebuah pesantren dan mengajar kitab-kitab kepada para santrinya. Selain gelar Kyai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).⁵⁰ Perlu ditekankan di sini bahwa ahli-ahli pengetahuan Islam dikalangan umat Islam disebut Ulama.

Dasar pikiran bahwa pendidikan merupakan sarana bagi pengembangan kepercayaan Islam, dan khususnya untuk mengembangkan kemampuan menafsirkan inti ajaran Islam merupakan tradisi yang sangat tua bagi orang-orang Islam.⁵¹ Hal ini jelas merupakan watak dan tradisi pesantren di Jawa sejak Islam mulai menarik banyak penganut. dalam tradisi pesantren dikenal pula sistem pemberian Ijazah, tetapi bentuknya tidak seperti yang kita kenal dalam sistem moderen, Ijazah model pesantren itu berbentuk pecantuman nama dalam suatu daftar rantai transmisi pengetahuan yang dikeluarkan oleh gurunya terhadap muridnya yang telah menyelesaikan pelajarannya dengan baik tentang suatu buku tertentu sehingga murid tersebut dianggap menguasai dan mengajarkannya kepada orang lain.

Dalam pembahasan ini, bahwa pesantren suatu bagian daripada institusi pendidikan Islam tradisional di Jawa. Salah satunya pondok Tebuireng yang telah

⁵⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1978), 55.

⁵¹ *Ibid*, 22-23.

memainkan perana yang dominan dalam pelestarian dan pengembangan tradisi pesantren di abad ke-20 hingga saan ini dan telah menjadi sumber penyedia (*supplier*) yang paling penting untuk kepemimpinan pesantren di seluruh Jawa dan Madura sejak tahun 1910-an.⁵² Pesantren Tebuireng ini juga telah memainkan peranan yang menentukan dalam pembentukan dan pengembangan Jam'iyah Nahdatul Ulama yang sejak didirikannya pada tahun 1926, telah turut mengambil bagian yang cukup penting dalam kehidupan politik di Indonesia.

F. Kyai

Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Pertumbuhan suatu pesantren bergantung kepada kempauan pribadi Kyainya. Pengetahuan Islam di kalangan Umat Islam disebut Ulama. Di Jawa Barat Kyai itu disebut *Ejengan*. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Ulama yang memimpin pesantren disebut Kyai. Namun di zaman sekarang banyak juga para Ulama yang cukup berpengaruh di masyarakat juga mendapat gelar “Kyai” walaupun mereka tidak memimpin pesantren. Dengan kaitan yang sangat kuat dengan tradisi pesantren, gelar Kyai biasanya dipakai untuk menunjuk para Ulama dari kelompok Islam tradisional dan hanya dalam pengertian semacam itulah perkataan “Kyai” dipakai.⁵³

Di Jawa suatu pesantren itu merupakan suatu pesantren yang dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil di mana Kyai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*Power and Authority*) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Meskipun kebanyakan Kyai di Jawa tinggal di daerah

⁵² Ibid, 101.

⁵³ Ibid, 55-56.

pedesaan, mereka merupakan bagian dari kelompok *elite* dalam struktur Sosial, Politik, Ekonomi masyarakat Jawa. Karena sebagai suatu kelompok, para Kyai yang memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat Jawa merupakan kekuatan penting dalam kehidupan Politik di Indonesia.

Untuk menjadi seorang Kyai harus berusaha keras melalui jenjang yang bertahap. Pertama, ia biasanya merupakan anggota keluarga dari Kyai. Setelah menyelesaikan pelajarannya di berbagai pesantren, Kyai pembimbingnya terakhir akan melatihnya untuk mendirikan pesantrennya sendiri. Kadang Kyai pembimbing ikut terjun langsung dalam pendirian proyek pesantren yang baru, sebab Kyai muda ini dianggap mempunyai potensi untuk menjadi seorang alim yang baik. Cara-cara seperti inilah yang dilakukan K.H. Hasyim Asy'ari, Pemimpin Pesantren Tebuireng kepada murid-muridnya antara lain Kyai Manaf Abdulkarim, pendiri pesantren Lirboyo Kediri, Jazuli pendiri Pesantren Ploso Kediri, dan Kyai Zuber pendiri Pesantren Reksosari di Salatiga. Menjelang masa-masa terakhir pendidikan mereka di Tebuireng 3 orang santri tersebut ditunjuk sebagai guru-guru senior dan anggota kelompok musyawarah.⁵⁴ Setelah K.H. Hasyim menimbang cukup matang dalam menunjuk mereka kemudian beliau mengatur perkawinan dengan wanita di desa-desa di mana Kyai-kyai muda ini akan mengembangkan pesantrennya. Pada masa-masa permulaan menjadi pemimpin baru pesantren, mereka juga dibekali oleh K.H. Hasyim dengan beberapa murid dari Tebuireng. Murid-murid ini merupakan modal pertama bagi Kyai muda tersebut untuk pengembangan pesantrennya lebih lanjut.

⁵⁴ Ibid, 58-59.